



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188 / 1445 / 432.131 / 2018

NOMOR : 188 / 20 / 432.100 / 2018

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. BADDRUT TAMAM, S.Psi.** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja Nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. a. **H A L I L I** : **Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. **H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. **H.M. SULI FARIS, SH.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. **H. HERMANTO** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 107 Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembagian Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2019;
- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan diterimanya usulan Raperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 belum selesai dibahas pada Tahun 2019, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesempatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

PIHAK KESATU
BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi.

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
KETUA,

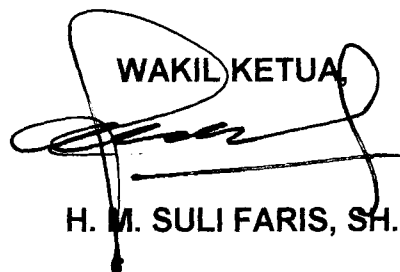


H. A L I L I

WAKIL KETUA,

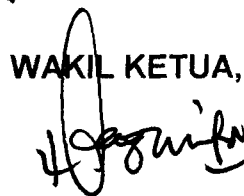
H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.

WAKIL KETUA,



H. M. SULI FARIS, SH.

WAKIL KETUA,



H. HERMANTO

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/445/432.131/2018

NOMOR : 188/20/432.100/2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PENGUSUL
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	PIHAK KESATU
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	PIHAK KESATU
3.	APBD Tahun Anggaran 2020	PIHAK KESATU
4.	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Penyusunan Zonasi	PIHAK KESATU
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023	PIHAK KESATU
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	PIHAK KESATU
7.	Perubahan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	PIHAK KESATU
8.	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	PIHAK KESATU
9.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	PIHAK KESATU
10.	Perubahan Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perda Kab. Pamekasan	PIHAK KEDUA
11.	Pengelolaan Parkir Khusus	PIHAK KEDUA
12.	Pemisahan PDAM dan Adeni	PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
KETUA,

H A L I L T

WAKIL KETUA,

H. IMAM HOSAIRI, S.Ag.

WAKIL KETUA,

H. M. SULI FARIS, SH.

WAKIL KETUA,

H. HERMANTO